

Kebijakan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar magister sains (M.Si) dalam ilmu hubungan internasional

Netik Indrawati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=118819&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini menjelaskan kebijakan luar negeri Australia terhadap 43 pemohon suaka politik asal Papua, Indonesia. Ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini akan mencakup pembahasan mengenai kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia, kebijakan Australia terhadap permohonan suaka politik. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Australia mengabulkan permohonan suaka politik warga Papua, dalam hal ini Australia memberikan visa perlindungan sementara selama tiga tahun (Temporary Protection Visa) dan setelah habis masa berlakunya bisa ditinjau kembali.

Tesis ini diawali dengan menjelaskan kondisi eksternal dan internal yang melatarbelakangi perumusan kebijakan luar negeri Australia, pasang surutnya hubungan Indonesia-Australia, latar belakang 43 warga Papua mengajukan permohonan suaka ke Australia serta kebijakan Australia terhadap permohonan suaka politik.

Dalam menjelaskan kebijakan Australia terhadap 43 pemohon suaka politik asal Papua, penulis menggunakan konsep kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh • Rosenau, Holsti, dan Lentner bagaimana perumusan sebuah kebijakan luar negeri suatu . negara, hak asasi manusia Mansyur Effendi, dimana Australia menganggap adanya pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan konsep kepentingan nasional dari I Morgenthau, yang menyatakan bahwa kepentingan nasional sangat penting dalam usaha-usaha untuk menggambarkan, meramalkan suatu perilaku internasional. Penulis juga memakai konsep suaka untuk memberi penjelasan lebih jauh tentang definisi suaka serya hukum permohonan dan pemberian suaka dan diplomasi bilateral dan preventive. Dalam tesis ini penulis menggunakan metode penelitian eksplanatif dimana menjawab pertanyaan mengapa Australia menetapkan kebijakan terhadap Indonesia untuk mengabulkan permohonan suaka politik 42 warga Papua. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui sumber-sumber tertulis seperti buku majalah, surat kabar, jurnal, dokumen website dan sebagainya. Teknik pengumpulat~ data yang digunakan adalah data deduktif, dimana menganalisa data-data yang bersifat umum, kemudian baru dikategorikan ke dalam hal-hal yang bersifat khusus.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa alasan Australia menetapkan kebijakan untuk mengabulkan permohonan suaka politik warga Papua, Indonesia adalah faktor eksternal dan internal yang mendasari perumusan kebijakan luar negeri~a, faktor internalnya adalah des:UCa~ elemen masyarakat Australia Yang diwakili oleh partai Hijau, faktor kepemptmpman Howard yang kurang bersahabat

dengan negara-negara Asia, menjaga popularitas, sementara faktor eksternalnya adalah upaya untuk menegakkan hak asasi manusia, dan adanya dengan ~on~es AS untuk mengabdikan permohonan suaka warga Papua tersebut. Disamping itu Australia mengemukakan alasan mengabdikan permohonan suaka politik tersebut adalah sesuai dengan apa yang tertera dalam peraturan-peraturan nasional maupun internasional mengenai suaka ataupun pengungsi: hukum nasional Australia, Konvensi PBB tahun 1951 tentang pengungsi dan Protokol 1967, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Australia menyatakan dalam rangka menjalankan kepentingannya untuk berperan serta menjadi masyarakat internasional yang baik yakni melindungi masyarakat yang hak asasinya terabaikan. Hubungan Indonesia-Australia memanas pasca dibencikannya suaka untuk 42 warga Papua:

Perumusan sebuah kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal dan dalam rangka memenuhi kepentingannya. Australia berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia dengan cara biasa membantu masalah-masalah internasional, dalam hal ini upaya penegakan hak asasi manusia. Australia beranggapan bahwa 42 warga Papua melanggar hak asasi manusia. Desakan dari elemen masyarakat Australia dan sikap perdana menteri Australia John Howard yang tidak bersahabat dengan negara-negara Asia dan populasi kepemimpinannya mulai menurun, mendorong Australia untuk mengabdikan permohonan suaka politik 42 warga Papua, Indonesia

.....This research describes Australia's foreign policy over 43 asylum seekers from Papua, Indonesia. It covers Australia's foreign policy over Indonesia and over asylum seekers. It aims to know Australia's reasons in granting their political asylum request, in this case Australia decided to grant the temporary protection visa valid for 3 years and after 3 years it can be reviewed.

This research starts describing the external and internal condition serving as the background of Australia's foreign policy, the up and down of the relationship between Indonesia and Australia, 43 Papuan's reason in proposing the asylum, and Australia's foreign policy over it.

In describing the Australia's policy over 43 Papuans, the writer uses Rosenau, Holsti and Lentner's theories of foreign policy, Mansyur Effendi's human rights. Australia suspects that Indonesia ignored the Papuans' human rights. It is also used Morgenthau's concept of national interest, it is very important in predicting, describing the international action. Australia wants to be a good international citizen, take part in solving international problems such as human rights ignorance. It also used the concept of asylum to explain further about the definition of asylum and the law of requesting and granting such asylum. Also it is used the theories of Watson and Roy's Diplomacy. The writer uses the explanatory research method to answer why or what reason Australia granted Papuans' asylum. The writer uses the secondary data from books, magazines, newspapers, journals, documents, and websites. The technique of collecting data is deductive data, analyzing general data, then categorized them into special ones. The result of the research shows Australia's reasons in granting the 42 Papuan's

asylum are the internal and external factors as the background of its policy. The internal factors are the press from the Australia society, the prime minister John Howard's leadership that are not friendly to Asia, lack of popularity, meanwhile the external ones are human rights protection, press from USA congress. Australia assumed that it decided to grant the asylum request based on its national law, international law, 1951 convention, and 1967 protocol about the refugee, human right universal declaration. In fulfilling its national interest Australia wants to be a good international citizen in protecting people from human rights abuse. Australia's foreign policy of granting the Papuans' asylum spoiled its relation with Indonesia. The formulation of foreign policy is based upon the internal and external factor in meeting the national interest. Australia wants to take part in making peacefulness in the world by solving the international issues, such as human rights abuse. Australia considered that 42 Papuan had their human rights abused. Besides that there was press from the Australians and the prime minister, John Howard's unfriendly with Asia, Jack of popularity. These caused Australia grant the Papuans' asylum.